

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang tergolong baru dalam hal penerapan program CSR. Penerapan CSR di Indonesia dimulai pada sekitar awal tahun 2000 tertinggal jauh dengan negara tetangga Filipina yang sudah menerapkannya sejak tahun 1970. Pada awalnya program ini masih menjadi hal yang cukup rumit karena di Indonesia sendiri belum mempunyai dasar hukum untuk mengatur program ini, pemerintah juga terlihat seperti memaksakan jalannya program ini padahal program CSR adalah program sukarela dan merupakan tanggung jawab perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR), adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan yang berkelanjutan. Secara implisit, definisi tersebut berarti mengajak perusahaan untuk bersungguh-sungguh dalam memberikan manfaat atas kehadirannya bagi umat manusia saat ini. Meminimalkan dampak negatif adalah bagian dari usaha memberikan manfaat di masa yang akan datang.¹

Berkat munculnya program CSR kini dunia usaha tidak lagi memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*Single Bottom Line*), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut *Triple Bottom Line*. Sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan. Penjelasan prinsip 3P yaitu : a. *profit*, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan

¹Rachman, Nurdizal M. 2011. *Pandual Lengkap Perencanaan CSR*. hlm 15.

ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang; b. *people*, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia; c. *planet*, perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati.²

Pada awal tahun 2007 dikeluarkan undang-undang yang mengurus tentang CSR serta memisahkan jenisnya menjadi 4 diantaranya :

Pertama, bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan, meliputi: bantuan korban bencana alam; bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; bantuan peningkatan kesehatan; bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; bantuan sarana ibadah; dan bantuan pelestarian alam.

Kedua, Peraturan bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, karena telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Dimana dalam pasal 74 diatur bahwa : (1)Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau

²Siregar. (2007) Jurnal. *Analisis Sosiologi Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia*, hlm. 1.

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketiga, bagi penanaman modal asing, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, meliputi: (a). Peringatan tertulis; (b). pembatasan kegiatan usaha; (c). pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d). pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Keempat, bagi perusahaan pengelola minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 13 ayat 3 (p), menyebutkan bahwa: "Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu : (p). pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat". Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola

eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan

Di Indonesia terdapat program CSR yang terbilang khusus dengan istilah PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. PKBL diatur dalam Peraturan MENTERI BUMI No.4 Tahun 2007, bahwa setiap BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di mana besaran alokasi PKBL tersebut bernilai maksimal 2% dari laba bersih.³ Di tengah-tengah kondisi masyarakat Indonesia yang lemah dari segi ekonomi, PKBL seharusnya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi seperti hal yang disampaikan oleh Rizky Wisnoentoro (Director of Applied Research for Indonesia CSR and Philanthropy Transdisciplinary Action Group (CPTAG)University Sains Malaysia) pada prakteknya PKBL lebih banyak berfokus pada pemberian pinjaman ataupun mikro-kredit bagi pengusaha kecil.⁴

Pada dekade terakhir ini dengan permasalahan sosial yang semakin kompleks, menempatkan CSR sebagai konten yang diharapkan mampu memberi terobosan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Sejarah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diyakini telah berkembang pesat masih banyak menyisakan masalah sosial yang cukup serius. Keterbatasan peranan negara dalam pemberantasan masalah sosial inilah yang menjadikan sektor privat (lewat kegiatan CSR) menjadi sangat penting untuk menyumbangkan sumber daya yang dimilikinya dalam membantu menyelesaikan permasalahan sosial tersebut.

³Dwi, Kartini, Prof, Dr. 2009. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 9.

⁴Rizky Wisnoentoro. *Tanya jawab CSR republika online*.

PT. MADUBARU merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan CSR melalui PKBL. perusahaan ini bergerak di bidang agrobisnis dengan produk gula pasir dan alkohol, PT Madubaru sendiri sejak tahun 2004 hingga saat ini kepemilikan sahamnya ada di tangan Sri Sultan Hamengkubuwono X (Kraton Yogyakarta) sebanyak 65% dan sisanya sebanyak 35% ada di tangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI). Terdapatnya sebagian saham ditangan BUMN menjadi alasan bahwa perusahaan tersebut melaksanakan tanggung jawab sosial dengan istilah dan dalam bentuk PKBL sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BUMN.⁵ Maka dari itu pada penelitian ini memilih PT. MADUBARU sebagai subjek penelitian karena mempunyai latar belakang yang cukup unik, dilihat dari kepemilikan saham perusahaan ini yang lebih dari separuhnya ialah milik Sri Sultan yang juga seorang gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan semua paparan di atas, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana proses kegiatan CSR PKBLPT. MADUBARU dalam hal pemberdayaan masyarakat lokal khususnya mitra binaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana proses kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. MADUBARU dalam hal pemberdayaan masyarakat guna tercapai kesejahteraan sosial masyarakat lokal (mitra binaan)?

⁵<http://asosiasigulaindonesia.org/our-members/pt-pg-madu-baru/>

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui proses kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. MADUBARU dalam hal pemberdayaan masyarakat guna tercapai kesejahteraan sosial masyarakat lokal (mitra binaan).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi :

1. Aspek keilmuan
 - 1) Sebagai pengalaman berharga dan tambahan pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Sebagai kajian pustaka atau penelaahan bagi berbagai pihak yang ingin mengetahui gambaran proses dan dampak pelaksanaan program CSR.
2. Aspek guna laksana (praktis)
 - 1) Kalangan akademisi, sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya mengenai CSR, khususnya tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
 - 2) Instansi terkait (*stakeholders*), sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan perencanaan selanjutnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka dasar teori yang dimaksudkan adalah teori-teori yang nantinya akan mendukung penelitian, sehingga menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Adapun menurut koentjaraningrat yang dimaksud dengan definisi teori adalah :

“Teori merupakan pernyataan mengacu sebab akibat atau mengenai gejala yang diteliti dari suatu atau beberapa factor-faktor tertentu dalam masyarakat”⁶

Dalam penelitian ini teori yang disajikan berorientasi pada CSR dan Pemberdayaan sosial. Dengan demikian dalam penelitian ini dasar dasar teori yang akan dikemukakan adalah meliputi :

1) *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)* menurut *World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)* adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika berperilaku (*behavioural ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas. Harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya dapat tercapai apabila terdapat komitmen penuh dari *top management* perusahaan terhadap penerapan CSR sebagai akuntabilitas publik.⁷

Menurut World Bank (Fox, Ward dan Howard 2002: 1), CSR merupakan komitmen sektor swasta untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dukungan sektor swasta dalam hal ini perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial, dimulai ketika tahun 2000, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk UN Global Compact sebagai salah satu lembaga yang

⁶Koentjaraningrat.1993. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, hlm 9.

⁷Efendi, Arief, Muh. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 107.

memakai konsep dan kegiatan CSR. Lembaga ini merupakan representasi kerangka kerja sektor swasta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan terciptanya *Good Corporate Citizenship* (UN Global Compact: 10). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberantas kemiskinan, menyelesaikan masalah buta huruf, memperbaiki layanan kesehatan, mengurangi angka kematian bayi, memberantas AIDS, menciptakan keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan, dan merangsang terciptanya kemitraan dalam proses pembangunan.⁸

Manfaat yang diperoleh perusahaan jika mengimplementasikan CSR adalah sebagai berikut:

- a. Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan citra (*image*) yang positif dari masyarakat luas.
- b. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal.
- c. Perusahaan dapat mempertahankan sumberdaya manusia (*human resources*) yang berkualitas.
- d. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko (*risk management*).

Pada saat ini CSR dapat dianggap sebagai investasi masa depan bagi perusahaan. Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di perusahaan yang telah menerapkan CSR lebih besar dibandingkan dengan yang tidak menerapkan CSR. Melalui program CSR dapat dibangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.⁹

⁸Ibid.

⁹Ibid

2) Pemberdayaan Masyarakat

a. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah “Pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengetasan kemiskinan” (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT).¹⁰ Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemakaian konsep pemberdayaan masyarakat, menurut Ife yang dikutip oleh Agus Purbathin Hadi dalam konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan, menyatakan bahwa¹¹ :

Pemberdayaan adalah proses membantu kelompok dan individu yang untuk bersaing secara lebih efektif dalam berbagai kepentingan, dengan membantu mereka untuk belajar me-lobi , menggunakan media, terlibat dalam aksi politik , memahami bagaimana sistem bekerja, dan sebagainya.

Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya

¹⁰Agus Purbathin Hadi. (tanpa tahun). *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*.

¹¹ Ibid

pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu¹²:

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang keberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan

¹² Theresia, aprilia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta. hlm. 119-121.

dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

b. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumaryadi, mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari¹³ :

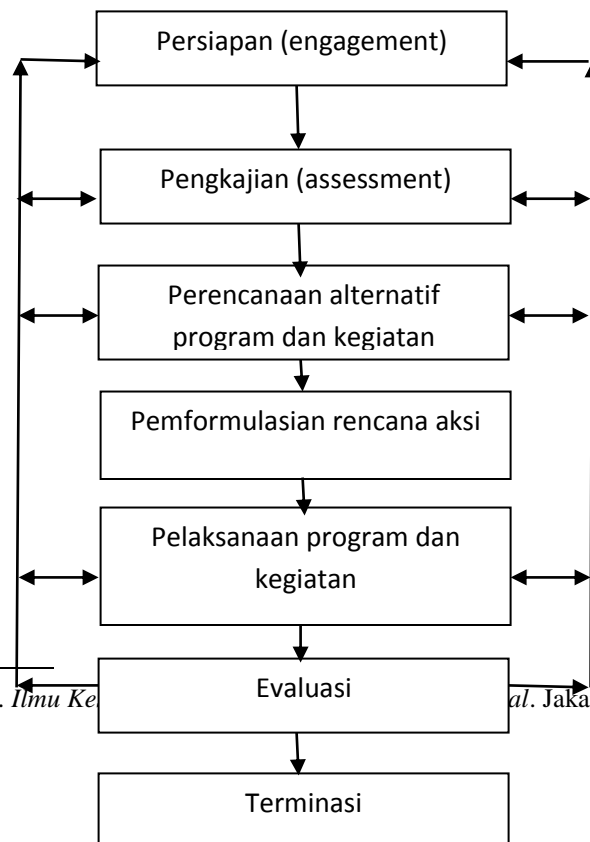
- 1) Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik-awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat;
- 2) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudia mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan;
- 3) Pengembangan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan;
- 4) Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya;

¹³ Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta. hlm. 122-123.

- 5) Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan;
- 6) Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan;
- 7) Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Sedangkan menurut adi dalam bukunya *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* tahapan pemberdayaan adalah sebagai berikut¹⁴ :

Bagan 1. Tahapan Pemberdayaan



¹⁴ Isbandi Rukminto Adi. 2004. *Ilmu Ke*

al. Jakarta: FISIF UI Press. hlm. 56.

Adapun untuk memperjelas maksud dari bagan di atas, maka akan diuraikan dibawah ini:

1) Tahap persiapan (*engagement*).

Pada tahapan ini ada dua tahap yang harus dikerjakan yaitu, pertama menyiapkan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat yang juga biasa dilakukan oleh *community worker* hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim mengenai pendekatan apa yang akan dipilih, penyiapan tugas lebih diperlukan lagi bila dalam proses pemberdayaan masyarakat tenaga yang dipilih memiliki latar belakang yang berbeda antara satu sama lain seperti; pendidikan, agama, suku, dan strata. Dan tahapan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan secara non direktif.

2) Pengkajian (*assessment*).

Proses pengkajian dapat dilakukan secara individu melalui tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang memiliki klien atau lebih tepatnya jika menggunakan teori SWOT, dengan melihat kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weaknesses*), kesempatan (*Opportunities*), dan ancaman (*Treath*).

3) Perencanaan alternatif program dan kegiatan.

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubah secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4) Pemformulasian Rencana Aksi.

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tulisan, terutama bila ada kaitan dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

5) Pelaksanaan Program Atau Kegiatan.

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng atau kembali pada tahap-tahap awal.

6) Evaluasi.

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan adanya keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu yang pendek bisa terbentuk suatu system komunitas untuk pengawasan secara internal, dan untuk

jangka panjang dapat membangun komunitas masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7) Terminasi.

Tahapan terminasi merupakan tahapan pemutusan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahapan ini diharapkan petugas tidak meninggalkan komunitas secara tiba-tiba walaupun proyek harus segera berhenti. Petugas tetap harus melakukan kontrak meskipun tidak secara rutin. Namun kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan kelompok sasaran.

c. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan secara konsisten¹⁵. Dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Mardikanto dan Soebianto mengutip Leagans, menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati, seorang penyuluh (apalagi administrator pemberdayaan) tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:

¹⁵ Mardikanto, Tatok dan Soebianto, Poerwoko. Op.cit. hlm. 105.

- 1) Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk menerapkan/ mengerjakan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama;
- 2) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena perasaan senang/puas atau kecewa akan mempengaruhi semangat untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan dimasa mendatang;
- 3) Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/ peristiwa yang lain. Misal dengan melihat cangkul orang diingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik; melihat tanaman yang kerdil/subur, akan mengingatkan pada usaha-uaha pemupukan dll.
- 4) Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat. mengenai hal ini, harus dikaji secara mendalam: apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap warga masyarakat, kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi sesuai dengan ketersedianya sumber daya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu.¹⁶

¹⁶Ibid

- 5) Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.

d. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karna kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun kondisi eksternal (misalnya ditindas struktural tidak adil).¹⁷

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah :

1. Mendorong, memotivasi meningkatkan kesadaran akan potensinya, dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang.
2. Memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif dalam memperkembangkannya.
3. Penyediaan bahan masukan, dan pembukaan keakses peluang. Upaya yang pokok yang dilakukan agar peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi lapangan kerja dan pasar dengan fasilitas-fasilitasnya.

3) Kesejahteraan Sosial

a. Pengertian Kesejahteraan Sosial

¹⁷ Syamsir Salam, Amir Fadilah. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah . hlm. 240

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Menurut definisinya, menurut Suharto kesejahteraan dibagi dalam tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial bagai suatu keadaan, kesejahteraan sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu¹⁸.kesejahteraan sosial termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yangseluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global¹⁹.

¹⁸ Edi Suharto.2010.*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Jakarta : Refika Adtama. hlm. 3-5.

¹⁹Penjelasan UU No. 11 tahun 2009.

b. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitasnya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Indikator kesejahteraan suatu daerah diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, emisi gas CO₂, perusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat produk domestik bruto (PDB).

Kesejahteraan suatu wilayah juga ditentukan dari ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya lain. Ketiga sumber daya tersebut berinteraksi dalam proses pengembangan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah²⁰, dan pendapatan orang kaya (golongan menengah ke atas) akan digunakan untuk dibelanjakan pada barang mewah, emas, perhiasan, rumah yang mahal.

²⁰http://benny-s-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-67789-Umum-Kesejahteraan%20Sosial.html

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah²¹ :

- 1) Tingkat pendapatan keluarga;
- 2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk sandang dan pangan;
- 3) Tingkat pendidikan keluarga;
- 4) Tingkat kesehatan keluarga;
- 5) Kondisi perumahan dan fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

c. Asas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial²²

- a. Asas kesetiakawanan, adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
- b. Asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- c. Asas kemanfaatan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.
- d. Asas keterpaduan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

²¹Badan Pusat Statistik DIY. 2000. Indikator Kesejahteraan Rakyat. Daerah Istimewa Yogyakarta : Badan Pusat Statistik DIY.

²² UU no 11 tahun 2009. Tentang kesejahteraan sosial.

- e. Asas kemitraan adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- f. Asas keterbukaan adalah memberikan akses yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- g. Asas akuntabilitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- h. Asas partisipasi adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- i. Asas profesionalitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.
- j. Asas keberlanjutan adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

d. Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

F. Definisi Konseptual

1. PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2 % (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2 % dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.²³

²³<http://www.angkasapura1.co.id/pkbl/?q=content/apa-itu-pkbl>

2. Pemberdayaan adalah upaya memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya.
3. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²⁴

G. Definisi Operasional

1. Tahapan pemberdayaan masyarakat oleh CSR PKBL PT. MADUBARUberfokus pada5 tahapan proses kegiatan pelatihan, studi banding dan pameranyang meliputi aspek:
 - a. Tahap Persiapan, meliputi;
 - 1) Menyiapkan materi penyuluhan.
 - 2) Menyiapkan lapangan/tujuan tempat yang akan dilakukan penyuluhan.
 - 3) Melakukan rekrutmen mitra binaan.
 - b. Pengkajian, meliputi aspek;
 - 1) Mengidentifikasi kebutuhan jenis binaan.
 - 2) Mengidentifikasi peluang pekerjaan yang ada dimasyarakat.
 - c. Perencanaan Alternatif Program dan Kegiatan, meliputi aspek;
 - 1) Musyawarah dengan mitra binaan,
 - 2) Memunculkan alternatif kegiatan dari ide mitra binaan.

²⁴UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

- d. Pemformulasian Rencana Aksi, meliputi aspek;
 - 1) Membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA).
 - 2) Membuat Pelatihan Menulis Proposal Mitra Binaan
- e. Pelaksanaan Program atau Kegiatan, meliputi aspek;
 - 1) Memberikan materi dan pengarahan kegiatan yang akan dilakukan.
 - 2) Melakukan bimbingan keterampilan

H. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu bertujuan untuk menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisis permasalahan yang ada²⁵, dan Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, menurut Lexy J. Moleong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati²⁶. Serta penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti guna untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan pemberdayaan pada CSR PKBLPT. MADUBARU.

2) Jenis Data

²⁵ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 2.

²⁶ Lexy Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, hlm. 5.

Data-data yang digunakan penulis dalam penulisan Skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Sugiyono mengatakan bahwa pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan skunder. Sumber primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber skunder tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Adapun data primer dan sekunder meliputi:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti melalui studi lapangan²⁸. Dalam hal ini data primer langsung diperoleh dari responden mengenai kegiatan CSR PKBLPT. MADUBARU dalam upaya pemberdayaan masyarakat sekitar terutama mitra binaan itu sendiri. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap staff dari unit PKBLPT. MADUBARU serta *Focus Group Discussion* (FGD) diskusi dengan warga binaan yang dipilih sesuai dengan kepentingan.

Tabel 1. Data Informan

NO	Nama	Jabatan	Metode
1	M. Ruslani	Pembina PKBL	Wawancara
2	Hanafi	Assisten/administrasi PKBL	Wawancara
3	30 Orang	Mitra binaan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan (pelatihan, studi banding dan pameran).	Focus group Discussion (FGD)

²⁷ Jurnal bisnis manajemen dan ekonomi, volume 10. No 3 agustus 2011.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui sumber lain yang berkaitan dan dapat menunjang penelitian ini, seperti diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, brosur dan surat kabar yang relevan dengan penelitian.

3) Unit Analisi Data

Sesuai dengan judul penelitian ini maka unit analisisnya adalah PKBL PT. MADUBARU dan sampel warga binaan , alasannya karena divisi ini lah yang menyelenggarakan kegiatan CSR yang berupa pengembangan sumberdaya dan pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya masyarakat sekitar yang diberikan pembinaan serta mitra binaan sendiri sebagai objek.

4) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu cara memperoleh data atau keterangan tentang suatu masalah dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung baik dengan pegawai Unit PKBL PT. MADUBARU.

b. Focus group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD)diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu.²⁹ Pada penelitian ini, diskusi

²⁹Irwanto. *Focus Group Discussion*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. hlm 1-2.

dilakukan terhadap mitra binaan PKBL PT. MADUBARU yang aktif mengikuti kegiatan pemberdayaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang pada penelititi kali ini adalah PT. MADUBARU PG-PS Madukismo Yogyakarta, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data-data yang relevan bagi penelitian.

5) Populasi dan Sampel

Menurut Creswell, populasi adalah suatu kelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama atau relatif serupa.³⁰ Sedangkan sampel Neuman adalah bagian dari populasi yang akan dilibatkan dalam penelitian yang merupakan bagian yang representatif yang merepresetatifkan karakter atau cirri-ciri yang sama dengan populasi.³¹

Dalam penelitan ini, populasi yang digunakan adalah Mitra Binaan PKBL PT. MADUBARU sebanyak 170 orang, peneliti mengambil 30 orang mitra binaan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan (pelatihan, pameran, studi banding) sebagai sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposeful sampling*. *Purposeful sampling* merupakan teknik dalam *non-probability sampling* yang berdasarkan kepada cirri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.³²

³⁰Haris herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm. 9.

³¹Ibid

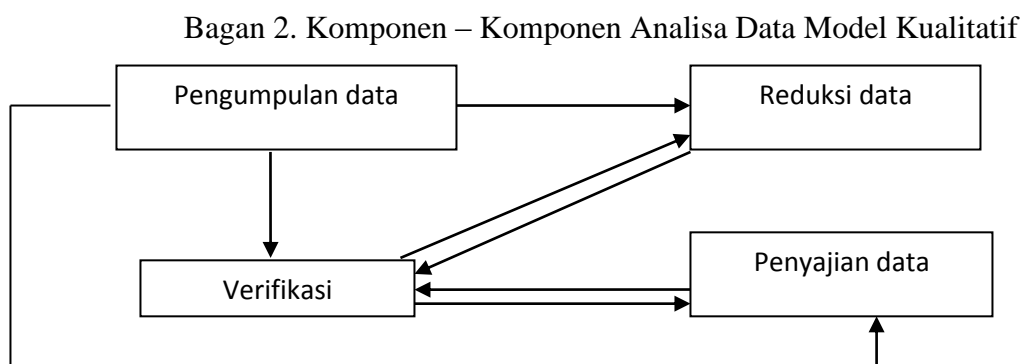
³² Ibid

Karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya CSR dalam pemberdayaan masyarakat khususnya kegiatan pelatihan, pameran dan studi banding, maka peneliti memilih mitra binaan yang benar-benar aktif dalam kegiatan pemberdayaan CSR PKBL PT. MADUBARU sebagai sampel yang dirasa dapat mendukung penelitian.

6) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang diorganisasi tersebut terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel. Analisis data dalam hal ini dengan mengatur mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan³³.

Menurut Matthew B, Milles dan A.M. Huberman analisis data dapat dilakukan dengan :



³³ Herman, A. Michale, Matthew B. dan Miles. *Analisis data kualitatif*. Universitas Indonesia. Jakarta. 1992. Hal 16

a. Reduksi

Ialah proses penilaian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transparansi data yang berdasar data lapangan.

b. Penyajian Data

Menjadikan informasi yang terkumpul, tersusun sehingga memberi suatu kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Verifikasi

Kegiatan untuk menyimpulkan catatan dari lapangan dimana data sebagai alat pencitraan yang ada di lapangan sehingga dari data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.